Pajak Hotel Dipungut Lagi

SALATIGA (KR) - Pemungutan pajak hotel dan restoran di Salatiga kembali diberlakukan, setelah keringanan pajak selama tiga bulan sejak Maret lalu hingga Mei 2020 tidak dipungut. "Kepala Dinas Keuangan Daerah (BKD) Salatiga, Adhi Isnanto mengatakan, dari hasil rapat bersama Tim Pertimbangan Pajak Pemkot Salatiga, selama dua bulan ke depan, yakni Juni-Juli 2020 masih ada keringanan pajak hotel sebesar 50 persen, " jelas Adhi Isnanto kepada KR, Selasa (16/6).

Menurutnya, selama ini pajak hotel dan restoran dibebankan kepada tamu (penginap) dan pembeli makanan di restoran, sehingga Pemkot Salatiga sudah membantu keberlangsungan usaha hotel dan restoran di tengah pandemi Covid-19. "Dengan pemberlakuan kebijaan ini, target penerimaan pajak hotel dan restoran di Salatiga yang tahun lalu Rp 12 miliar, saat ini hanya Rp 6 miliar," jelas Adhi Isnanto. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Salatiga, Arso Adji Sajiarto mengaku dirinya belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan keputusan tersebut. "Kami berharap belum ada penarikan keringanan pajak, karena kondisi masih lesu dan masih minus untuk operasional," ungkapnya. **(Sus)-a**

Purwokerto Berlakukan Jalan SSA

BANYUMAS (KR) - Jalan sistem satu arah (SSA) diberlakukan yang sudah berjalan beberapa pekan ini di Kota Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas, terhitung mulai Rabu (17/6) dipermanenkan, dengan peraturan bupati (Perbup). Sejak 18 Mei lalu, diterapkan jalan SSA di sejumlah ruas, untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang hingga 26 Mei, sekaligus untuk mendorong penyebaran pusat keramaian ekonomi ke berbagai wilayah.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, Selasa (16/6) menjelaskan pemberlakukan jalan SSA dipermanenkan mendasarkan hasil evaluasi kinerja lalu lintas. "Dari evaluasi dan diskusi masukan berbagai pihak, jalan SSA akan dipermanenkan mulai Rabu (17/6) pukul 8.00 dan berlaku selama 24 jam, " jelasnya.

Permanenan jalan SSA ke arah barat diawali dari pertigaan sebelah selatan Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Soedirman sampai simpang Alun-alun Purwokerto. Untuk arah ke timur, dimulai dari perempatan Omnia, Jalan Gatot Subroto, Jalan Komisaris Bambang Suprapto (Kombas) sampai pertigaan Jalan MT Haryono utara. Untuk Jalan RA Wiratmaja (Jalan Bank) tetap berlaku dua arah, kemudian Jalan Jenderal Soedirman sebelah barat alun-alun tetap berlaku dua arah sampai pertigaan Makodim 0701 Banyumas. Kemudian Jalan MT Haryono satu arah ke selatan, Jalan Brigjen Katamso satu arah ke utara, Jalan Masjid satu arah ke utara sampai perempatan Omnia. Kemudian Jalan Pengadilan sebelah timur alun-alun, satu arah ke selatann, dan Jalan Ragasemangsang satu arah ke utara. **(Dri)-a**

TERSEDOT PANDEMI COVID-19 DI SOLO

Gaji TKPK Terancam Tidak Terbayar

SOLO (KR) - Gaji Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK), Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan penarik sampah di lingkungan kelurahan dan kecamatan di Solo, terancam tak terbayarkan mulai September nanti.

Pasalnya, kebutuhan anggaran selama satu tahun yang telah dialokasikan untuk pekerja non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu, ikut tersedot dalam rasionalisasi untuk percepatan penanganan virus Korona (Covid-19).

Kesulitan pembayaran gaji bagi TKPK, Linmas, dan penarik sampah itu, ungkap Ketua Komisi I DPRD Solo, Suharsono, diketahui saat pertemuan rasionalisasi anggaran dengan lurah dan camat, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, rasioanlisasi anggaran untuk kelurahan dan kecamatan tercatat Rp 25 miliar. Di antaranya pos anggaran yang telah dialokasikan untuk gaji TKPK, Linmas dan penarik sampah selama 14 bulan, sehingga tinggal tersisa untuk memenuhi kebutuhan gaji selama 8 bulan.

Karenanya, dalam waktu dekat Komisi I DPRD Solo akan menggelar rapat dengan mitra kerja eksekutif yang terkait dengan pembayaran gaji karyawan, agar persoalan tersebut segera bisa dirampungkan. Pada dasarnya, DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo segera menyusun strategi agar pegawai tidak tetap itu dapat menerima haknya tepat waktu. Masih ada sisa waktu tiga bulan untuk menyelesaikannya, dan mesti ditempatkan sebagai skala prioritas.

Sementara ini, menurut Suharsono, rasionalisasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 yang dikonangi berimbas pada kesulitan pembayaran pegawai kontrak, baru sebatas TKPK, Linmas, dan penarik sampah di kelurahan dan kecamatan. Tak menutup kemungkinan, hal serupa juga terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, sebab hingga kini belum dicermati lebih lanjut.

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, terpisah mengakui Pemkot Solo kehilangan kemampuan membayar gaji TKPK, Linmas, dan penarik sampah yang bertugas di kelurahan dan kecamatan akibat rasionalisasi anggara untuk covid-19. Kendati begitu, Pemkot Solo akan berupaya keras agar gaji bagi karyawan tidak tetap tersebut tetap terbayarkan tepat pada waktunya.

Skenario solusi yang disiapkan, menurut Walikota, mengalokasikan kekurangan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang hendak dibahas bersama legislatif dalam waktu dekat. "Saya berprinsip, jangan sampai menunda pembayaran gaji pegawai dengan alasan apapun," tandasnya. **(Hut)-a**

20 WARGA KARANGANYAR REAKTIF

Purbalingga Fokuskan 'Rapid Test'

SUKOHARJO (KR) Total ada 2.830 orang sudah mengikuti *rapid test* yang digelar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Sukoharjo. Sasaran dilakukan petugas terhadap orang dalam pemantauan (ODP) yang masih menjalani isolasi mandiri, ODP baru, pasien dalam pengawasan (PDP) baru, orang tanpa gejala (OTG) dan masyarakat umum. Kegiatan digelar disejumlah tempat keramaian seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Sukoharjo Yunia Wahdiyati, Selasa (16/6) mengatakan, pelaksanaan rapid test terhadap 2.830 orang tersebut digelar dalam lima tahap. Tahap 1 ada 130 orang dengan hasil, reaktif 6 orang, hasil swab positif 3 orang, nonreaktif 124 orang, Tahap 2 ada 500 orang, hasilnya reaktif 54 orang, hasil swab positif 16 orang dan non reaktif 418 orang, Tahap 3 ada 1.000 orang, hasilnya reaktif 72 orang, hasil swab positif 25 orang dan non reaktif 928 orang.

Di Purbalingga, sejak 5 Juni lalu tidak terjadi penambahan kasus Covid-19. Kondisi 11 hari tanpa tambahan kasus positif korona itu membawa harapan dan optimisme baru untuk memasuki era normal baru. "Bila sampai 30 Juni tidak ada pasien positif baru, kami akan mulai menerapkan era tatanan kehidupan baru," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Selasa (16/6).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga, Hanung Wikantono membenarkan, sejak 5 Juni hingga Selasa (16/6) siang tidak ada pasien baru Korona. "Akumulasi pasien positif korona 59 orang. Hingga hari ini 45 pasien sudah dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal dunia, dan ada 13 orang yang masih dirawat," jelasnya. Sementara itu, 20 orang asal Kecamatan Jumapolo dan Kebakkramat reaktif usai menjalani *rapid test*. **(Mam/Rus/Lim)-a**

Wonosobo Kaji 'Penormalan' Kesenian

WONOSOBO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo sedang mengkaji persiapan *new normal* atau tatanan normal baru bagi para pekerja seni di kabupaten setempat. Hampir empat bulan atau selama masa wabah virus korona (Covid-19), mereka tidak melakukan aktivitas sama sekali. Padahal untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, kesehariannya para pekerja seni sangat tergantung dari hasil pentar di berbagai event.

"Berbagai kajian persiapan menuju tatanan normal baru bagi para pekerja seni akan segera dilakukan. Termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian, BPBD, dan dinas terkait," kata Bupati Wonosobo Eko Purnomo didampingi Sekda One Andang Wardoyo ketika menerima audiensi pengurus gabungan pekerja seni 'Pelangi' Wonosobo, Senin (15/6). Bukan hanya mengkaji persiapan normal baru, Bupati juga langsung memerintahkan Sekda dan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait, sehingga para pekerja seni di Wonosobo yang terdampak serius akibat pandemi Covid-19 bisa mendapatkan bantuan.

Pemberlakuan *new normal* bagi pekerja seni di daerah juga mendapatkan perhatian serius dari Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro yang turut mendampingi para pekerja seni dipimpin Ketua Pelangi Wonosobo, Rullyawan Nugroho. Suwondo minta agar bupati segera berkoordinasi dengan Kapolres terkait adanya tuntutan pemberlakuan *new normal* bagi kalangan seni dan budaya, karena hal tersebut masuk dalam salah satu poin Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 yang melarang kegiatan yang mendatangkan kerumunan, termasuk kegiatan konser musik atau kegiatan seni-budaya, guna mengantisipasi penyebaran virus Korona. **(Art)-a**

HUKUM

Bawa Uang Milik Juragan, Dirampok

SLEMAN (KR) - Pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalan Seyegan-Godean Dusun Kadipiro Margodadi Seyegan, Senin (15/6) malam. Korban Ahmad Khoirul (22) warga Muntilan Magelang selain kehilangan uang Rp 6,5 juta, juga mengalami luka bacok.

Kapolsek Seyegan AKP Samidi membenarkan kejadian itu, hanya saja korban enggan membuat laporan kepolisian. Dari informasi yang didapat *KR*, peristiwa terjadi sekitar pukul 20.00. Saat mengendarai motor seorang diri, korban tiba-tiba dipepet empat orang berboncengan motor jenis matik. Korban langsung disabet dengan senjata tajam di bagian lengan sebanyak dua kali.

Terkena sabetan sajam, korban menepi kemudian lari ke sawah dan meninggalkan motornya di jalan. Dari kejauhan, korban melihat para pelaku mengutak-atik motor miliknya dan beberapa saat kemudian melarikan diri ke arah selatan setelah melihat ada pengendara melaju dari arah yang sama.

Setelah itu, korban berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan. Sebagian warga membawa korban ke rumah sakit terdekat, sedangkan warga lainnya mengamankan motor korban ke Polsek Seyegan. Sekitar pukul 22.30, korban datang ke Polsek Seyegan berniat mengecek uang Rp 6,5 juta yang ditaruh dalam jok.

Namun ternyata, uang milik juragannya itu sudah raib. Saat dimintai keterangan, korban mengaku awalnya ia diminta juragannya membeli ikan di Pasar Pasty Yogya dan dibekali uang Rp 6,5 juta dan ditaruh di dalam jok motor. Hanya saja begitu sampai pasar hewan itu, korban tidak bertemu dengan penjualnya sehingga melanjutkan perjalanan menawarkan pakan udang di wilayah Godean. Setelah itu, korban bermaksud pulang melewati lokasi kejadian. Atas kejadian itu, korban mengalami luka bacok 3 tempat yakni di tangan kanan sebanyak dua bacokan dan satu bacokan di paha sehingga mendapatkan 22 jahitan. **(Ayu)-a**

Dikira Musang, Teman Ditembak

MAGELANG (KR) - Bermaksud berburu musang, ternyata yang terkena tembakan justru temannya sendiri. Itulah yang menimpa Widiyanto (38) warga Sewukan Dukun Kabupaten Magelang saat melakukan perburuan di wilayah Desa Kemiren Srumbung, Senin (15/6).

Kapolres Magelang AKBP Roland Ardiyanto P SIK MSi didampingi Kasat Reskrim Polres Magelang AKP Hadi Handoko, Selasa (16/6), mengungkapkan pihaknya telah mengamankan SF rekan korban. Sedangkan hasil visum tim medis RS Bhayangkara Yogyakarta menyebutkan dada Widiyanto sebelah kiri terkena tembakan. Hingga Selasa kemarin masih ditunggu hasil pemeriksaan otopsinya. Setelah diotopsi, jenazah korban dimakankan keluarganya.

Hadi Handoko mengungkapkan, Senin pagi korban Widiyanto pergi berburu musang di wilayah Kemiren Srumbung bersama 2 temannya. Sampainya di lokasi, mereka berpencar. Beberapa saat kemudian SF (29) yang tinggal di Kecamatan Salam Magelang yang ikut berburu, mengetahui ada sesuatu berwarna hitam dan bergerak-gerak di semak-semak yang diduga musang.

Dengan menggunakan senapan angin kaliber 4,5 model gas yang dibawanya, ia membidik dan menembak sasarannya tersebut. **(Tha)-a**

KR-Mohammad Thoha

Kasat Reskrim Polres Magelang menunjukkan senjata angin yang diamankan.

PERKARA KORUPSI APBDES BANGUNCIPTO

Kades dan Bendahara Diduga Potong Anggaran

SLEMAN (KR) - Kades Banguncipto Sentolo Kulonprogo HS (56) dan bendahara desa SM (61) mulai diadili di PN Tipikor Yogya dalam perkara dugaan korupsi dan APBDes Tahun 2016 hingga 2018.

Diduga para terdakwa melakukan pemotongan dan mark up atau penggelembungan anggaran dana APBDes.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Noviana Permanasari SH mengungkapkan, para terdakwa ini diduga melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan APBDes sejak tahun 2016 hingga 2018. Diduga para terdakwa melakukan pemotongan dan mark up anggaran.

"Dalam perkara ini, kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2, subsider Pasal 3, lebih subsider Pasal 8 dan lebih-lebih subsider Pasal 12 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi," ungkap JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan SH SPNot, Selasa (16/6).

Sidang kemarin dilaksanakan secara virtual. Untuk kedua terdakwa berada di Lapas Wates. Sedangkan di PN dihadiri majelis hakim, JPU dan penasehat hukum terdakwa.

Modus yang dilakukan kedua terdakwa adalah pemotongan anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang didanai dana desa.

Dimana dana desa yang telah dicairkan telah dipotong oleh terdakwa HS. Kemudian sisanya diserahkan ke bendahara dan dilanjutkan ke saksi Tri Laksono.

"Untuk membuat SPJ, saksi Laksono memanipulasi bukti pertanggungjawaban dengan cara menambah upah tenaga kerja dan jumlah hari serta jumlah pekerja. Selain itu meminta kuitansi kosong yang telah distempel toko bangunan," terangnya.

Di samping itu, kedua terdakwa diduga melakukan *mark up* dan kegiatan fiktif. Kegiatan yang didanai menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi maupun pendapatan asli desa dikerjakan sendiri.

"Uang kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai pagu anggaran, membelanjakan sendiri kepada pihak ketiga dan meminta kuitansi kosong. Kemudian terdakwa 'mark up' anggaran dan membuat SPJ kegiatan fiktif. Selain itu ada honor kegiatan yang tidak dibayarkan," paparnya. **(Sni)-a**

KR-Saifullah Nur Ichwan

JPU membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa dugaan penyimpangan APBDes Desa Banguncipto Sentolo.

SALING MENANTANG LEWAT MEDSOS

Bawa Sajam, Pelajar Diringkus

YOGYA (KR) - Pelajar paket B, RGR (17) warga Sedayu, diamankan petugas Polsek Umbulharjo karena kedapatan membawa sajam jenis pedang saat akan tawuran dengan geng lainnya. Pelaku dengan lawannya itu saling menantang di media sosial (medsos).

Kapolsek Umbulharjo Kompol Achmad Setyo Budiantoro SH didampingi Kanit Rekrim Iptu Nuri Ariyanto SH MH, mengungkapkan awalnya tersangka bertemu dengan temannya di Pasar Gamping. Kemudian tersangka pulang ke rumahnya untuk mengambil sajam.

"Tersangka mengambil sajam karena sebelumnya mendapat tantangan untuk tawuran melalui medsos. Setelah itu, tersangka bersama temannya nongkrong di Ngabean," ungkapnya.

Saat nongkrong, tersangka masih sempat komunikasi dengan lawannya. Sekitar pukul 16.00, tersangka bersama temannya menuju Jalan Batikan untuk bertemu atau tawuran dengan lawannya. "Sesampai di TKP, tersangka dilempar helm oleh lawannya. Kemudian tersangka mengejarnya sambi mengacungkan sajam," terangnya. **(Sni)-a**

Lari Pagi, Temukan Bayi Mungil

SLEMAN (KR) - Petugas Polsek Prambanan dan Satreskrim Polres Sleman masih menyelidiki kasus penemuan bayi yang ditemukan warga Dusun Gunungharjo, Prambanan pada Minggu (14/6). "Temuan itu awalnya dilaporkan oleh warga ke Polsek Prambanan, namun kini ditangani Polres Sleman. Sedangkan bayinya dalam perawatan petugas medis RSUD Prambanan," ujar Kapolsek Prambanan AKP Rubiyanto, Selasa (16/6). Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Deni Irwansyah juga membenarkan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi.

"Terkait orangtua maupun pelaku serta motif bayi itu dibuang, masih terus kami dalami," tandasnya. Informasi yang dihimpun *KR*, bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu, diperkirakan berusia tiga hari. Bayi ditemukan oleh Muhammad Alwan (17), saat saksi tengah berolahraga lari pagi bersama temannya Muhammad Faris (16). Saat ditemukan tergeletak di jalan, bayi malang yang diduga sengaja dibuang oleh orangtuanya ini, dalam keadaan berselimut. Sejumlah barang juga ditemukan bersama bayi tersebut seperti perlak, bantal bayi dan gelang identitas bayi yang masih dipakai di pergelangan tangan. **(Ayu)-a**